

PERKEMBANGAN SEKOLAH RAKYAT DI ADIKARTO PADA TAHUN 1942–1945

DEVELOPMENT OF *SEKOLAH RAKYAT* IN ADIKARTO IN 1942–1945

Oleh: Erwina Dwi Saputri, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, winaw.saputri@gmail.com

Abstrak

Pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942–1945 telah mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya Sekolah Rakyat yang merupakan bentuk penyederhaan baru dalam pendidikan dengan lama tempuh 6 tahun. Adikarto sebagai wilayah kekuasaan Pakualaman mempunyai Sekolah-Sekolah Rakyat yang berkembang dengan cukup baik. Perkembangan Sekolah Rakyat khususnya yang berstatus Negeri di Adikarto terdiri dari 41 sekolah yang tersebar di empat *kapanewon*. Keberadaan Sekolah Rakyat di Adikarto memberikan dampak dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik Sekolah Rakyat menjadi salah satu sarana indoktrinasi Jepang. Dalam bidang sosial, Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang lebih bagi masyarakat Adikarto untuk mengenyam pendidikan tanpa mengkhawatirkan latar belakang. Dampak budaya, diizinkannya Bahasa Indonesia yang mampu memicu rasa nasionalisme. Dampak ekonomi berkaitan dengan gaji tenaga pengajar yang mengalami kenaikan. Meskipun demikian, kesejahteraan tenaga pengajar tidak bisa diukur dari kenaikan gaji karena situasi ekonomi perang pada saat itu.

Kata Kunci: *Sekolah Rakyat, Adikarto, 1942–1945*

Abstract

Japanese occupation in Indonesia from 1942-1945 had influenced the development of education. One of them was the school called Sekolah Rakyat which was a new form of simplification in education with a duration of 6 years. Adikarto as the territory of Pakualaman had many Sekolah Rakyat which were developing well. The development of the Sekolah Rakyat, especially those with the state status in Adikarto, consisted of 41 schools spreaded over four Kapanewon. The existence of Sekolah Rakyat in Adikarto had impacts in various fields. In the political field, it became one of the ways of Japanese indoctrination. In the social field, it provided more opportunities for people to get education without worrying their backgrounds. In the cultural impact, Indonesian language was permitted which strengthened a sense of nationalism. In the economic impact, it was related to the salary increases of teaching staffs. However, the welfare of the teaching staff could not be measured by salary increases due to the economic situation of the war at that time.

Keywords: *Sekolah Rakyat, Adikarto, 1942–1945*

Pendahuluan

Keberadaan Politik Etis mampu membawa suasana baru bagi bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan dalam Politik Etis adalah pendidikan. Dalam pendidikan tersebut terdapat kebijakan yang diterapkan. Stratifikasi sosial juga berlaku dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda. Beberapa sekolah yang didirikan antara lain Sekolah Kelas Dua, HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), HCS (*Hollandsch-Chineesche School*), MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), dan lainnya. Meskipun tidak bisa dirasakan secara bebas dan merata, keberadaan sekolah-sekolah tersebut telah membawa dampak yang cukup besar bagi rakyat Indonesia.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekuatan-kekuatan negara-negara Eropa di Indonesia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah kekuatan besar yang baru dari Asia Timur, yaitu Jepang. Peran Jepang dalam perpolitikan di dunia juga cukup besar. Pada tahun 1940, pemimpin-pemimpin Jepang mulai membicarakan secara terang-terangan tentang ‘pembebasan’ Indonesia.¹ Sebelumnya, Indonesia direncanakan menjadi sasaran serbuan Jepang, sesuai dengan “Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijakan Mengenai Daerah-Daerah Selatan” yang dirumuskan oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada tanggal 4 Oktober 1940.² Dalam rencana itu, Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis

terutama minyak dan karet, yang harus dikuasai dengan cara menduduki Indonesia.³

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan tampil sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Pasifik. Pada awalnya, pendudukan Jepang di Indonesia mendapatkan simpati yang cukup baik dari masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai macam propaganda yang digaungkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia. Setelah berhasil menguasai Indonesia sepenuhnya, Jepang mulai untuk merubah berbagai sistem dan kebijakan yang telah berlangsung di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Jepang adalah dalam bidang pendidikan.

Di Jawa pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan sistem pendidikan tunggal dan kurikulum baru yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang.⁴ Pada dasarnya, terdapat perbedaan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang. Beberapa hal yang dilakukan oleh Jepang dalam bidang pendidikan adalah dihapuskannya sistem pendidikan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Belanda. Penyederhanaan dalam sistem pendidikan dilakukan oleh Jepang dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Sekolah umum terdiri dari atas Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tinggi masing-masing 3

¹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 228.

² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 2.

³ Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 29–30.

⁴ Chiyo Kawamura, “Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang dari Perspektif Buku Pelajaran”, *Lembaran Sejarah*, Vol. 7, No. 1, 2004, hlm. 156.

tahun.⁵ Sistem tersebut yang kemudian diterapkan di Indonesia sampai saat ini. Dengan disederhanakannya sistem pendidikan dan sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang, maka kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia, semua mendapat kesempatan yang sama.⁶

Sekolah Rakyat atau disebut juga dengan *Kekumin Gakko* dengan lama tempuh 6 tahun. Sekolah Rakyat terbuka untuk semua golongan secara umum. Sekolah Rakyat mulai berkembang di berbagai wilayah, salah satunya adalah Adikarto. Adikarto merupakan sebuah kabupaten yang wilayahnya termasuk dalam kekuasaan Pakualaman. Adikarto memiliki empat *kapanewon* yang terdiri dari Galoer, Pandjatan, Wates, dan Temon. Di Adikarto sendiri berkembang 41 Sekolah Rakyat yang berstatus Negeri.⁷ Perkembangan Sekolah-Sekolah di wilayah Adikarto juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan pada saat itu.

Penulisan artikel ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai kondisi umum Kabupaten Adikarto, menjelaskan perkembangan Sekolah Rakyat di

Adikarto pada tahun 1942–1945, serta menjelaskan dampak dari berlangsungnya sistem pendidikan Jepang di Sekolah Rakyat terhadap masyarakat di Adikarto.

Metode Penelitian

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.⁸ Metode sejarah tersebut terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama adalah heuristik yang merupakan suatu proses dalam rangka mengumpulkan berbagai macam sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berguna bagi penelitian yang berkaitan. Sumber primer umunya berupa arsip, catatan perjalanan, risalah sidang, daftar hadir peserta (sebuah rapat), surat keputusan, dan sebagainya.⁹ Sumber sekunder juga memiliki peran yang tidak kalah penting dengan sumber primer. Kadang sumber sekunder sangat berguna untuk lebih memahami secara tepat dan mendalam mengenai latar belakang sumber-sumber dan dokumen sezaman.¹⁰ Kedua adalah kritik sumber yang merupakan langkah yang penting untuk menentukan otentisitas (keaslian) dan kredibilitas sumber yang berkaitan. Dalam kritik sumber, biasanya dilakukan dengan

⁵ Amrin Imran, dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, T. T.), hlm. 75.

⁶ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 28.

⁷ Arsip Pakualaman, *Surat dari Paniradya Wijata Pradja Pakualaman Tanggal IV Gatsoe 2064, tentang Laporan Penerimaan Alat dan Perkakas Pengajaran dari Bagian Pengajaran Kasultanan di Yogyakarta untuk Sekolah di Wilayah Pakualaman untuk Tahun 2604/2605*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2067.

⁸ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27–28.

⁹ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 44.

¹⁰ A. Daliman, *op. cit.*, hlm. 56.

kritik eksternal dan internal yang nantinya menghasilkan fakta sejarah. Ketiga adalah interpretasi yaitu upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.¹¹ Setelah menemukan fakta-fakta sejarah, maka harus ditafsirkan sesuai dengan fakta yang ada. Penafsiran tersebut juga harus ada ketertarikan antar satu sama lain. Keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah sesuai dengan data-data yang ditemukan dan digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Adikarto

Kadipaten Pakualaman secara resmi berdiri pada tanggal 17 Maret 1813.¹² Kadipaten Pakualaman terdiri dari dua wilayah, yakni wilayah dalam Pakualaman dan Adikarto. Letak Kabupaten Adikarto berada di antara Sungai Bogowonto yang berada di sebelah Barat dan Sungai Progo yang berada di sebelah Timur. Kemudian Kabupaten Adikarto di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Kasultanan Yogyakarta. Di sebelah Barat selain berbatasan dengan Sungai Bogowonto juga berbatasan dengan wilayah Purworejo yang termasuk dalam Karesidenan Kedu. Di sebelah Timur selain berbatasan langsung dengan Sungai Progo juga berbatasan dengan Kabupaten Bantul yang termasuk dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta. Selanjutnya di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Adikarto yang berada di bagian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹² Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi & Nilai Kejuangannya*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 7.

selatan Kulon Progo terdiri dari empat asistenan (*kapanewon*). Masing-masing asistenan dikepalai oleh seorang asisten wedana atau pangreh praja dan membawahi beberapa desa.¹³ Empat *kapanewon* di Adikarto meliputi Galoer, Pandjatan, Wates, dan Temon. Keempat wilayah kecil tersebut berstatus sebagai *son* atau kecamatan. Kabupaten Adikarto mempunyai total kelurahan sebanyak 52 kelurahan yang terdiri dari Galoer sebanyak 13 kelurahan, Pandjatan sebanyak 13 kelurahan, Wates sebanyak 12 kelurahan, dan Temon sebanyak 14 kelurahan.¹⁴ Pada masa Pendudukan Jepang, struktur pemerintahan di Adikarto terbagi menjadi empat bidang yang terdiri dari Pertanian (Ekonomi), *Radyo Soejoso* (Pengairan), *Ajahan Oemoem*, dan *Soerogomo* (berkaitan dengan keagamaan).¹⁵

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1942 turut serta mempengaruhi kondisi sosial di Indonesia. Secara umum, di dalam stratifikasi, orang Jepang telah menempatkan dirinya secara kuat. Tetapi, untuk orang Indonesia tetap berada di bawah mereka dalam posisi apapun.¹⁶ Dengan demikian, stratifikasi sosial yang berlaku selama masa

¹³ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11.

¹⁴ Arsip Pakualaman, *Skema Masa Pemerintahan SDK GPAA PA VIII*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 1352.

¹⁵ Arsip Pakualaman, *Skema Masa Pemerintahan SDK GPAA PA VIII*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 1352.

¹⁶ Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 284–285.

Pendudukan Jepang adalah orang-orang Jepang sebagai penguasa utama, orang-orang Indonesia, dan orang-orang Barat atau Eropa. Adikarto sebagai salah satu wilayah kekuasaan Pakualaman juga mempunyai stratifikasi sosial yang berlaku di masyarakatnya. Stratifikasi tersebut terdiri dari golongan bangsawan, golongan priyayi, dan golongan *wong cilik*.¹⁷ Para keturunan raja lainnya merupakan kelompok yang merupakan pejabat tinggi pemerintah. Anggota-anggota kelompok inilah yang disebut kaum bangsawan atau *sentonodalem* dalam Bahasa Jawa.¹⁸ Golongan priyayi adalah pegawai-pegawai pemerintahan, tetapi diangkat dari rakyat biasa. Fungsi kelas masyarakat ini adalah melaksanakan semua perintah raja yang disampaikan melalui kaum bangsawan.¹⁹ Di Adikarto, golongan priyayi turut berperan dalam pengembangan pendidikan. Misalnya Paduka *Regent* Adikarto dibantu dengan priyayi-priyayi lain di Wates, telah didirikan sebuah rumah *Internaat* (Sonorini) yang telah mendapatkan subsidi dari kedua *Zelfbesturen* (Negeri Pakualaman dan Kasultanan).²⁰ Golongan *wong cilik* ini disebut juga “orang kecil” yang terdiri dari kaum tani, pedagang, dan para karyawan perusahaan swasta dan perdagangan.²¹ Kondisi pendidikan di Adikarto menjadi

salah satu hal yang penting. Pendidikan yang berlangsung di Pakualaman telah dirintis sejak Paku Alam I menjadi raja. Paku Alam I (Kanjeng Pangeran Notokusumo) sendiri memberikan pelajaran segala sesuatu pengetahuan dan ilmu tata-negara kepada para putera dan sentana.²² Dalam bidang pendidikan, *Regentschap* Adikarto dianggap berkembang dengan cukup baik. Rumah sekolah di *Regentschap* Adikarto terus bertambah banyak. Semua desa telah punya rumah sekolah, baik kepunyaan desa maupun swasta.²³ Tidak berhenti pada Paku Alam VII saja, pengembangan pendidikan terus berlangsung dan dianggap sebagai salah satu hal yang penting. Subsidi-subsidi tidak hanya diberikan di Pakualaman saja, namun juga di *Regentschap* Adikarto. Hal tersebut dikarenakan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan. Lantaran peristiwa tersebut, maka ternyata bahwa perkembangan dan kemajuan menuntut ilmu pengetahuan di tanah Kadipaten Pakualaman, baik di dalam maupun di luar kota (daerah Kabupaten Adikarto, Kulon Progo) sangat pesatnya.²⁴

Pada masa pemerintahan Belanda, beberapa sekolah telah didirikan di Adikarto. Sekolah-sekolah pada masa pemerintahan Belanda juga masih dibedakan sesuai dengan stratifikasi yang berlaku pada saat itu. Sekolah-sekolah yang ada di Adikarto sebelum tahun 1942 juga terbatas. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya

¹⁷ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁰ Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 307.

²¹ Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 24.

²² Panitia Peringatan Kota Yogyakarta ke 200, *Kota Yogyakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756–7 Oktober 1956*, (Yogyakarta: T. P., 1956), hlm. 67.

²³ Soedarisman Poerwokoesoemo, *op. cit.*, hlm. 306.

²⁴ Panitia Peringatan Kota Yogyakarta ke 200, *loc. cit.*

Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*), Sekolah Desa (*Volk School*), Sekolah Lanjutan (*Vervolg School*), Sekolah Sambungan (*Schakel School*), dan Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda (*Hollands Inlands School*).²⁵ Beberapa sekolah tersebut didirikan di Adikarto untuk membantu perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Berikut merupakan penjelasannya:

- a. Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) merupakan Sekolah Kelas Dua merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera pada umumnya dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat biasa pada umumnya.²⁶ Sekolah ini juga nantinya hanya menghasilkan pekerja-pekerja rendah.
- b. Sekolah Desa (*Volks School*) merupakan sebuah sekolah yang mempunyai lama tepuh 3 tahun. Kurikulum dalam Sekolah Desa ini juga cukup sederhana. Di samping pelajaran membaca, menulis, dan berhitung dalam Bahasa Jawa, juga diajarkan pekerjaan tangan membuat keranjang, pot, genteng, dan sebagainya.²⁷
- c. Sekolah Lanjutan (*Vervolg School*) merupakan sebuah sekolah lanjutan bagi Sekolah Desa dengan lama tempuh 2 tahun. Dalam kegiatan belajar mengajar digunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Sekolah Lanjutan ini dianggap

mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Sekolah Kelas Dua.

- d. Sekolah Sambungan (*Schakel School*) merupakan sebuah sekolah dengan lama tempuh selama 5 tahun. Sekolah ini disamakan dengan HIS (*Hollands Inlands School*) jadi memberi hak untuk masuk MULO dan selanjutnya.²⁸ Sekolah ini merupakan sekolah peralihan yang mulai menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Maksudnya adalah penggunaan bahasa daerah yang sebelumnya dijadikan sebagai bahasa pengantar, mulai diganti dengan Bahasa Belanda.
- e. Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda (*Hollands Inlands School*) merupakan sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi orang Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan Barat. Sekolah ini mempunyai masa tempuh selama 7 tahun. Dalam kegiatan belajar mengajarnya untuk kelas 1, 2, dan 3 menggunakan pengantar bahasa daerah dan ditambahkan dengan pelajaran Bahasa Belanda. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6, dan 7 menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.

B. Sekolah Rakyat di Adikarto Tahun 1942–1945

Pendudukan Jepang secara resmi telah berlangsung sejak tahun 1942. Dalam pendudukannya, Jepang melakukan berbagai macam perubahan dalam seluruh sistem di Indonesia. Salah satu yang mengalami perubahan adalah dalam sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan dan mengefektifkan Jepang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sekolah-sekolah. Sistem

²⁵ Parinem, “Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2003), hlm. 42.

²⁶ Ary H. Gunawan, *op. cit.*, hlm. 14.

²⁷ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 77.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

pendidikan baru yang ditetapkan oleh Jepang menyebabkan munculnya Sekolah Rakyat yang mempunyai lama tempuh 6 tahun. Pembukaan Sekolah Rakyat ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1942.²⁹ Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa semua sekolah rendah baik kepunyaan Pemerintah dan Partikelir yang memakai bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura akan dibuka lagi pada tanggal 29 April 1942. Pembukaan sekolah-sekolah tersebut juga harus mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian, semua sekolah yang sudah dibuka maupun yang akan dibuka harus ditutup terlebih dahulu. Pembukaan semua sekolah harus menunggu perintah dari pemerintah.

Sekolah Rakyat, khususnya yang berstatus Negeri, merupakan salah satu tingkatan dalam pendidikan yang turut berkembang di Adikarto. Jumlah Sekolah Rakyat Negeri yang berkembang di Adikarto pada masa Pendudukan Jepang sebanyak 41 sekolah. Sekolah-Sekolah Rakyat Negeri di Adikarto tersebar di seluruh empat *Kapanewon* di Adikarto mulai dari Wates, Pandjatan, Galoer, dan Temon. Penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut diorganisir dan diawasi oleh sebuah badan yang bernama *Paniti Wijata Pradja* yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sekolah Rakyat Negeri di Adikarto menerapkan berbagai macam aturan yang secara garis besar diterapkan secara umum pada masa Jepang berkuasa.

Berdasarkan laporan keadaan Sekolah Rakyat di Adikarto pada bulan

XI tahun 2604 jumlah Sekolah Rakyat secara keseluruhan di Adikarto sebanyak 41 sekolah. Jumlah keseluruhan muridnya baik laki-laki maupun perempuan adalah sebanyak 5.812 orang. Kemudian, jumlah keseluruhan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut sebanyak 109 orang.³⁰ Berikut merupakan penjelasannya:

- a. Wates mempunyai Sekolah Rakyat Negeri sebanyak 15 sekolah. Jumlah keseluruhan siswanya adalah 2.362 orang yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 1.775 orang dan siswa perempuan sebanyak 587 orang. Kemudian jumlah tenaga pengajar secara keseluruhan adalah 47 orang yang terdiri dari 37 tenaga pengajar laki-laki dan 10 tenaga pengajar perempuan.
- b. Pandjatan mempunyai Sekolah Rakyat Negeri sebanyak 12 sekolah. Jumlah keseluruhan siswanya adalah 1.755 orang yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 1.481 orang dan siswa perempuan sebanyak 274 orang. Kemudian jumlah tenaga pengajar secara keseluruhan adalah 29 orang yang terdiri dari 27 tenaga pengajar laki-laki dan 2 tenaga pengajar perempuan.
- c. Galoer mempunyai Sekolah Rakyat Negeri sebanyak 6 sekolah. Jumlah keseluruhan siswanya adalah 751 orang yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 580 orang dan siswa perempuan sebanyak 171 orang. Kemudian jumlah tenaga pengajar secara keseluruhan adalah 14 orang yang terdiri dari 11 tenaga pengajar laki-laki dan 3 tenaga pengajar perempuan.
- d. Temon sebanyak mempunyai Sekolah Rakyat Negeri 8 sekolah.

²⁹ Arsip Pakualaman, *Undang-Undang Nomor: 12 Pembesar Balatentara Dai Nippon, Tentang Pembukaan Sekolah Pemerintah dan Partikelir yang Memakai Bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura tanggal 29 April 1942*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2064.

³⁰ Arsip Pakualaman, *Bendel Permohonan Uang Belanja dari Kas untuk Pekerjaan Pakualaman*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 3238.

Jumlah keseluruhan siswanya adalah 1.132 orang yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 761 orang dan siswa perempuan sebanyak 371 orang. Kemudian jumlah tenaga pengajar secara keseluruhan adalah 19 orang yang terdiri dari 12 tenaga pengajar laki-laki dan 7 tenaga pengajar perempuan.

Berkaitan dengan kelulusan, terdapat laporan mengenai kelulusan kelas VI dari Sekolah Rakyat Negeri Sogan pada tahun 2605. Dalam laporan kelulusan tersebut disebutkan bahwa kelas VI di Sekolah Rakyat Sogan mempunyai murid berjumlah 48 yang mana 47 di antaranya berhasil menamatkan belajarnya dan mendapatkan ijazah, sedangkan hanya 1 orang yang tidak berhasil menamatkan belajarnya.³¹ Kemudian dalam Sekolah Rakyat Brosot dalam laporan tamatan belajar kelas VI tahun 2605 terbagi menjadi dua kelas. Kelas VI a mempunyai murid sebanyak 26 orang dan yang berhasil tamat belajar sebanyak 22 murid, sedangkan yang tidak tamat belajar sebanyak 4 murid. Kelas VI b mempunyai murid sebanyak 33 orang dan yang berhasil tamat belajar sebanyak 29 murid, sedangkan yang tidak tamat belajar sebanyak 4 murid.³² Murid-murid yang berhasil menamatkan belajar dalam tingkat Sekolah Rakyat kemudian dapat melanjutkan pendidikan mereka dalam sekolah lanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Jepang

³¹ Arsip Pakualaman, *Daftar Murid yang Naik Kelas dan Murid yang Mendapat Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Rakyat Sogan Nomor: 44 Sogan, Wates, Adikarto*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2153.

³² Arsip Pakualaman, *Daftar Murid yang Naik Kelas dan Tamat Belajar Pada Sekolah Rakyat Pakualaman*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2145.

juga memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Sebetulnya, uang sekolah tidak selalu gratis atau cuma-cuma, tetapi bergantung pada sekolahnya. Namun, dalam banyak hal, biayanya lebih murah dibandingkan pada zaman Belanda.³³ Di Adikarto sendiri, jumlah keseluruhan murid yang digratiskan biaya sekolahnya di Adikarto adalah 290 murid dari 5.812 murid.³⁴

Dalam Sekolah Rakyat sendiri, kurikulum yang ditetapkan oleh Jepang berupa kurikulum yang secara tidak langsung disusun untuk mengindoktrinasi murid-murid. Dalam salah satu laporan tamat belajar Sekolah Rakyat di Sogan memuat mata pelajaran yang di dalamnya meliputi Latihan Rohani, Bahasa Nippon, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Sejarah, Ilmu Bumi, Berhitung, Ilmu Alam, Latihan Jasmani, Seni Suara, Menulis, Kerajinan, Menggambar, Bekerja, dan Perusahaan.³⁵ Dalam pelaksanaannya, Jepang juga menetapkan kebijakan dalam penggunaan buku-buku pelajaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan mengenai penggunaan buku-buku yang berbahasa Belanda yang mulai disingkirkan dan tidak digunakan lagi pada masa Jepang. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dalam waktu singkat dikeluarkan oleh kantor

³³ Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 403.

³⁴ Arsip Pakualaman, *Bendel Permohonan Uang Belanja dari Kas untuk Pekerjaan Pakualaman*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 3238.

³⁵ Arsip Pakualaman, *Daftar Anak-Anak yang Tamat dari Kelas VI dan Mendapat Ijazah*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2153.

pengajaran (*Bunkyo Kyoku*).³⁶ Selain itu, murid-murid Sekolah Rakyat di Adikarto juga turut mempelajari Bahasa Jepang dengan bantuan buku-buku yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, murid-murid Sekolah Rakyat di Adikarto juga diwajibkan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan lain seperti penanaman jarak dan kapas, melakukan pekerjaan umum atau kerja bakti, dan melakukan penanaman tanaman hasil bumi. Kebijakan penanaman jarak ini dianggap cukup penting oleh Jepang yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perang. Oleh karena itu, rakyat tidak hanya dipaksa menanam jarak di atas tanah pertanian mereka, tetapi juga di pekarangan rumah dan sepanjang tepi jalan.³⁷ Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sekolah Rakyat di Sogan, penanaman kapas dilakukan oleh 124 murid dalam pekarangan yang luasnya 1622 m². Tanaman kapas yang telah dipelihara murid-murid tersebut telah mencapai umur 2 bulan yang kemudian dipungut hasilnya oleh 40 murid yang telah ditugaskan.³⁸ Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh murid-murid Sekolah Rakyat di

Adikarto adalah melakukan pekerjaan umum atau kerja bakti berupa menghancurkan batu-bata, membersihkan kebun dan mencabuti rumput, memperbaiki bendungan dan selokan yang rusak. Kegiatan lainnya berupa menanam tanaman hasil bumi, baik di pekarangan sekolah maupun pekarangan rumah. Salah satu contohnya adalah murid-murid di Sekolah Rakyat Puteri di Wates melakukan kegiatan menanam kapas dalam pekarangan sekolah yang luasnya 80 m². Kegiatan tersebut dikerjakan oleh 30 orang selama satu hari. Melalui hasil laporan pemeriksaan tersebut, tanaman kapas yang telah ditanam oleh murid-murid di Sekolah Rakyat Puteri di Wates telah berumur 3 bulan. Selain tanaman kapas, murid-murid juga menanam *brambang* (bawang merah) dan terong dalam pekarangan sekolah yang masing-masing mempunyai luas 15 m² dan 6 m². Pekerjaan-pekerjaan umum atau kerja bakti yang dilakukan sebagai kegiatan tambahan ini sering kali dilakukan selama jam sekolah sebagai bagian dari kurikulum. Kegiatannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari dua jam sampai empat jam. Akibat sering dilakukan kerja bakti maka pelaksanaan kurikulum secara normal menjadi sangat terganggu.³⁹

Keberlangsungan Sekolah-Sekolah Rakyat di Adikarto ini juga tidak luput dari peran para tenaga pengajar. Tenaga pengajar di Sekolah Rakyat tidak hanya terdiri dari tenaga pengajar pokok atau utama, namun juga terdapat tenaga pengajar pembantu atau guru bantu. Tenaga pengajar pada masa Pendudukan Jepang diwajibkan untuk mengikuti kursus Bahasa Jepang. Hal tersebut dikarenakan di sekolah dasar tidak ada orang Jepang, dan guru-guru Indonesia terpaksa mengajar Bahasa

³⁶ Asti Kurniawati, *Membangun (?) Narasi Menghadirkan Pesona: Akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta "Kota Pendidikan"*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 66.

³⁷ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 36.

³⁸ Arsip Pakualaman, *Surat dari Pemerintah Kadipaten Pakualaman, tentang Daftar Pelaporan Pemeriksaan Hasil Bumi di Pekarangan Sekolah-Sekolah di Seluruh Kadipaten Pakualaman, Juni –gatsu 2604*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2066.

³⁹ Aiko Kurasawa, (2015), *op. cit.*, hlm. 413.

Jepang setelah menjalani kursus intensif berjangka pendek.⁴⁰ Di Adikarto sendiri, beberapa guru telah mengikuti kursus Bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh Jepang. Beberapa guru yang lulus dalam ujian tingkat IV Bahasa Jepang tersebut adalah C. Hadisoebroto, Nonah Soeradjinah, R. Hadipranoto, Cholik Padmowidjojo, Soeparman Adiwinto, R. Soeparman, Soejatinah, F. M. Mangoensoebroto, Sahiman, dan Lamin Martoharsono.⁴¹ Guru-guru yang lulus dalam ujian tingkatan IV tersebut kemudian diizinkan untuk mengajar Bahasa Jepang di Sekolah Rakyat di Adikarto. Kursus-kursus Bahasa Jepang juga diselenggarakan di Sekolah-Sekolah Rakyat di Adikarto. Dalam kursus Bahasa Jepang tersebut, materi yang diajarkan dimulai dari materi-materi sederhana, seperti sapaan sampai dengan percakapan-percakapan sederhana. Selain itu, Jepang juga menerbitkan panduan untuk berbahasa Jepang secara sederhana.⁴² Panduan tersebut ditujukan untuk guru-guru yang kurang paham pengetahuannya mengenai Bahasa Jepang. Dalam panduan tersebut dituliskan mengenai contoh percakapan-percakapan sederhana, contoh sebuah paragraf mengenai tanaman jarak, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai tenaga pengajar, khususnya tenaga pengajar yang bekerja di Sekolah Rakyat, maka tidak terlepas dari upah atau gaji yang didapatkan selama bekerja sebagai guru

di sekolah-sekolah tersebut. Beberapa Sekolah Rakyat di Adikarto memberikan laporan mengenai tenaga pengajar yang menerima gaji setelah melepaskan jabatan. Salah satunya adalah guru di Sekolah Rakyat Pandjatan. Dalam laporan tertanggal 18 bulan 10 tahun 2604 (1944) dituliskan 4 tenaga pengajar yang menerima gaji.⁴³ Salah satunya adalah seorang guru bernama Nata Siswapranata yang pangkat terakhir sebagai guru di Sekolah Rakyat Pandjatan mendapatkan gaji pokok sebesar 56,85. Kemudian ditambah dengan tunjangan sebesar 5,- dan total gaji yang diperoleh sebesar 61,85. Gaji tenaga pengajar pada masa Jepang berkuasa dikatakan meningkat dibandingkan dengan gaji pada masa Belanda. Namun, kenaikan gaji mereka sesungguhnya tidak berarti banyak bagi peningkatan kehidupan mereka karena tingginya inflasi.⁴⁴

C. Dampak Sistem Pendidikan Jepang di Sekolah Rakyat Terhadap Masyarakat Adikarto

Pendudukan Jepang atas Indonesia berakhir pada tahun 1945 dan ditandai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berakhirnya Pendudukan Jepang tersebut juga mempengaruhi beberapa kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh Jepang, seperti kebijakan mengenai pengibaran bendera dan kursus Bahasa Jepang. Pertama adalah mengenai pengembalian Bendera Matahari kepada pemerintah. Pemerintah melalui *Wedana Wiyata Pradja Pakualaman* memberikan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi

⁴⁰ Aiko Kurasawa, (2015), *op. cit.*, hlm. 411.

⁴¹ *Sinar Matahari*, "Lulus Ujian Bahasa Nippon Tingkat ke IV", 08-2-Gatsu 2605.

⁴² Arsip Pakualaman, *Pelaporan tentang Kursus-Kursus Bahasa Nippon di P.A. Koo Kooti bulan II 2605*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 1508.

⁴³ Arsip Pakualaman, *Daftar Guru-Guru dan Murid-Murid di Sekolah Rakyat di Adikarta tahun 2604*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 1819.

⁴⁴ Aiko Kurasawa, (2015), *op. cit.*, hlm. 416.

Panitia Wiyata Pradja Adikarto mengenai penyerahan kembali bendera *kokki*. Dalam surat pemberitahuan tersebut dituliskan bahwa kepala-kepala sekolah rakyat dan pertama untuk menyerahkan Bendera Matahari Terbit yang dulu diterima dari pemerintah untuk diserahkan kembali kepada pemerintah, baik di daerah Adikarto, di kabupaten atau di *kapawon*.⁴⁵ Kedua adalah penghentian kursus Bahasa Jepang yang telah dilaksanakan sejak awal Jepang berkuasa di Indonesia pada tahun 1942. Penghentian kursus Bahasa Jepang ini disampaikan oleh pemerintah melalui surat pemberitahuan tersebut dikirimkan pada tanggal 24 September 1945.⁴⁶ Surat pemberitahuan pemberhentian kursus Bahasa Jepang tersebut juga diberikan kepada Bupati Papatih Pradja Adikarto di Wates. Dengan demikian, di Adikarto pun semua kursus dan pelajaran Bahasa Nippon serentak dihentikan.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Adikarto memberikan dampak dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam bidang politik, Indoktrinasi yang dilakukan oleh Jepang melalui berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Siswa diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat. Pada periode akhir Pendudukan Jepang terdapat tanda-tanda bahwa

penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menjepangkan anak-anak Indonesia.⁴⁷ Penerapan kebijakan pengibaran bendera Merah Putih juga berpengaruh kepada masyarakat. Maksudnya adalah bangsa Indonesia pada akhirnya dapat melihat kembali jati dirinya yang kemudian dapat memicu tumbuhnya kembali rasa nasionalisme. Dalam bidang sosial, kebijakan yang diterapkan oleh Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan.⁴⁸ Sekolah Rakyat muncul sebagai sekolah yang terbuka untuk umum dan tanpa memandang latar belakang. Diberlakukannya kebijakan tersebut, maka anak-anak di Adikarto mempunyai kesempatan untuk belajar dengan kualitas yang sama, tidak dibeda-bedakan menurut golongan seperti pada masa Pemerintah Belanda. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat di Adikarto menjadi lebih baik. Para orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat di Adikarto.

Lebih lanjut, dalam bidang budaya, pendidikan juga tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat.⁴⁹ Bahasa merupakan salah

⁴⁵ Arsip Pakualaman, *Surat dari Wedana Wijata Pradja Pakualaman kepada Kepala Sekolah Rakyat di Pakualaman tentang Pengesahan Kembali Bendera Matahari terbit ke Pemerintah (29 Agustus 2605)*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 2152.

⁴⁶ Arsip Pakualaman, *Surat Keputusan Pangeran Hario Papatih di Pradja Pakualaman Perihal Pemberhentian Kursus Bahasa Nippon*, Senarai Arsip Pakualaman, No. 3923.

⁴⁷ Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 37.

⁴⁸ Hendri F. Isnaeni dan Apid, *Romusa: Sejarah yang Terlupakan (1942-1945)*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 40.

⁴⁹ Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002), hlm. 7.

satu unsur budaya. Salah satu kebijakan Jepang adalah memperbolehkan penggunaan Bahasa Indonesia baik dalam kegiatan di sekolah maupun dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sekolah-sekolah Rakyat di Adikarto mampu menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme yang telah lama terpendam. Terakhir, dalam bidang ekonomi Jepang memberikan peningkatan gaji bagi tenaga pengajar. Pun demikian dengan gaji tenaga pengajar di Adikarto yang juga mengalami peningkatan. Rata-rata gaji yang didapatkan oleh tenaga pengajar Sekolah Rakyat di Adikarto lebih besar dibandingkan dengan gaji yang telah ditetapkan oleh Jepang. Besaran gaji yang diterima baik oleh guru tetap maupun guru bantu berkisar antara f 30,- sampai dengan di atas f 100,- khusus untuk kepala sekolah. Gaji yang didapatkan oleh tenaga pengajar juga sudah ditambahkan dengan gaji tambahan atau tunjangan yang berhak diberikan kepada mereka.⁵⁰ Dalam perkembangannya, peningkatan gaji yang diperoleh tenaga pengajar tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan mereka. Kenaikan gaji mereka sesungguhnya tidak berarti banyak bagi peningkatan kehidupan mereka karena tingginya inflasi.⁵¹

Kesimpulan

Kabupaten Adikarto secara lebih tepatnya terletak di wilayah yang sebelah utara berbatasan langsung

dengan Kabupaten Kulon Progo milik Kasultanan Yogyakarta. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Progo dan Kabupaten Bantul milik Kasultanan Yogyakarta. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bogowonto dan wilayah Purworejo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Adikarto hanya memiliki empat *kanewon* yang berstatus sebagai *son* atau kecamatan. Empat *kanewon* tersebut adalah Galoer, Pandjatan, Wates, dan Temon. Kemudian Kabupaten Adikarto mempunyai kalurahan yang jumlah totalnya adalah 52 kalurahan yang tersebar di keempat wilayah tersebut.

Perkembangan pendidikan selanjutnya di Kabupaten Adikarto terjadi pada masa Pendudukan Jepang. Jepang datang dengan menghapuskan sistem pendidikan Barat yang diskriminatif dan melakukan penyederhanaan dalam sistem pendidikan. Sekolah dijadikan ke dalam tiga tingkatan saja, yakni Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Sekolah Rakyat khususnya yang berstatus Negeri di Kabupaten Adikarto tersebar di empat *kanewon* mulai dari Wates sampai dengan Temon. Dalam laporan keadaan sekolah bulan XI tahun 2604, jumlah Sekolah Rakyat di Adikarto adalah 41 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 5.812 orang, sedangkan jumlah keseluruhan tenaga pengajarnya adalah 109 orang. Dalam kegiatan belajar mengajar, Jepang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di Sekolah Rakyat termasuk di Kabupaten Adikarto. Kemudian, murid-murid Sekolah Rakyat di Adikarto juga diwajibkan untuk mempelajari Bahasa Jepang. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perang, murid-murid diwajibkan untuk melakukan pekerjaan di pekarangan sekolah, seperti menanam jarak, kapas, dan tanaman hasil bumi.

⁵⁰ Arsip Pakualaman, *Paniti Wijata Pradja Pakualaman kepada Pemerintah Kabupaten Pakualaman, Daftar Nama-Nama Guru di Pakualaman Ko Koti*, Senarai Arsip Pakualaman No. 2120.

⁵¹ Aiko Kurasawa, (2015), *op. cit.*, hlm. 416.

Adapun kegiatan lainnya adalah kerja bakti di lingkungan sekitar sekolah, seperti membersihkan bendungan, membersihkan sungai, mencabuti rumput, menata batu-bata, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut juga diterapkan oleh Jepang untuk membangun disiplin murid.

Selama masa Pendudukan Jepang, tenaga pengajar dianggap sebagai sarana yang penting dalam berlangsungnya proses Indoktrinasi. Oleh sebab itu, beberapa tenaga pengajar di Adikarto dikirim ke Jakarta untuk melakukan kursus atau latihan indoktrinasi, yang meliputi kursus Bahasa Jepang dan pengenalan budaya-budaya Jepang. Kemudian, tenaga pengajar diberikan gaji yang dianggap lebih besar dibandingkan gaji semasa Pemerintah Belanda. Akan tetapi, besarnya gaji yang diperoleh tenaga pengajar tidak bisa meningkatkan kesejahteraan mereka pula. Hal tersebut berkaitan dengan situasi ekonomi perang di Indonesia yang dikuasai dan dikendalikan oleh Jepang.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat khususnya di Adikarto tentunya memberikan dampak bagi masyarakat di Adikarto itu sendiri. Dampak tersebut mulai dari dampak politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dampak politik yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah masuknya indoktrinasi Jepang melalui pendidikan. Ada kebijakan yang menguntungkan seperti diperbolehkannya bendera Merah Putih. Dampak Sosial yang ditimbulkan adalah selama masa Pendudukan Jepang, diskriminasi dalam pendidikan dihilangkan. Semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama tidak memandang latar belakang apapun. Oleh karena itulah, adanya kebijakan tersebut memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, termasuk di Kabupaten Adikarto. Dampak Budaya yang

ditimbulkan berkaitan dengan diizinkan penggunaannya Bahasa Indonesia kembali. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Penggunaan Bahasa Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagi masyarakat. Adanya Sekolah Rakyat mendorong tenaga pengajar untuk bekerja lebih ekstra dalam mempelajari Bahasa Jepang yang sangat asing digunakan. Oleh karena itu, Jepang memberikan kenaikan gaji bagi para tenaga pengajar. Namun demikian, kenaikan gaji tersebut tidak memberikan banyak arti bagi kehidupan para tenaga pengajar. Pada akhirnya, kekacauan sistem ekonomi pada saat itu turut serta mempengaruhi murid-murid di Sekolah Rakyat, seperti murid-murid yang keluar dari sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Pun demikian yang terjadi di masyarakat Adikarto.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip:
Arsip Pakualaman No. 1352, Skema Masa Pemerintahan SDK GPAA PA VIII.
- Arsip Pakualaman No. 1508*, Pelaporan tentang Kursus-Kursus Bahasa Nippon di P.A. Koo Kooti bulan II 2605.
- Arsip Pakualaman No. 1819*, Daftar Guru-Guru dan Murid-Murid di Sekolah Rakyat di Adikarta tahun 2604.
- Arsip Pakualaman No. 2064*, Undang-Undang Nomor: 12 Pembesar Balatentara Dai Nippon, Tentang Pembukaan Sekolah Pemerintah dan Partikelir yang Memakai Bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura tanggal 29 April 1942.

- Arsip Pakualaman No. 2066*, Surat dari Pemerintah Kadipaten Pakualaman, tentang Daftar Pelaporan Pemeriksaan Hasil Bumi di Pekarangan Sekolah-Sekolah di Seluruh Kadipaten Pakualaman, Juni –gatsu 2604.
- Arsip Pakualaman No. 2067*, Surat dari Paniradya Wijata Pradja Pakualaman Tanggal IV Gatsoe 2064, tentang Laporan Penerimaan Alat dan Perkakas Pengajaran dari Bagian Pengajaran Kasultanan di Yogyakarta untuk Sekolah di Wilayah Pakualaman untuk Tahun 2604/2605.
- Arsip Pakualaman No. 2120*, Paniti Wijata Pradja Pakualaman kepada Pemerintah Kabupaten Pakualaman, Daftar Nama-Nama Guru di Pakualaman Ko Koti.
- Arsip Pakualaman No. 2152*, Surat dari Wedana Wijata Pradja Pakualaman kepada Kepala Sekolah Rakyat di Pakualaman tentang Pengesahan Kembali Bendera Matahari terbit ke Pemerintah (29 Agustus 2605).
- Arsip Pakualaman No. 2153*, Daftar Murid yang Naik Kelas dan Murid yang Mendapat Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Rakyat Sogan Nomor: 44 Sogan, Wates, Adikarto.
- Arsip Pakualaman No. 2145*, Daftar Murid yang Naik Kelas dan Tamat Belajar Pada Sekolah Rakyat Pakualaman.
- Arsip Pakualaman No. 3238*, Bendel Permohonan Uang Belanja dari Kas untuk Pekerjaan Pakualaman.
- Arsip Pakualaman No. 3923*, Surat Keputusan Pangeran Hario Papatih di Pradja Pakualaman Perihal Pemberhentian Kursus Bahasa Nippon.
- Sinar Matahari*, “Lulus Ujian Bahasa Nippon Tingkat ke IV”, 08-2-Gatsu 2605.
- Buku:
 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Amrin Imran, dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, T. T.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Asti Kurniawati, *Membangun (?) Narasi Menghadirkan Pesona: Akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta “Kota Pendidikan”*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Daliman, A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi & Nilai Kejuangannya*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendri F. Isnaeni dan Apid, *Romusa: Sejarah yang Terlupakan (1942-1945)*, Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Pendidikan*,

- Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kawamura, Chiyo, "Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang dari Perspektif Buku Pelajaran", *Lembaran Sejarah*, Vol. 7, No. 1, 2004.
- Kurasawa, Aiko, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- _____, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo, 1993.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta Pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.
- Panitia Peringatan Kota Yogyakarta ke 200, *Kota Yogyakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*, Yogyakarta: T. P., 1956.
- Parinem, "Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

Dosen Pembimbing TAS



Dinar Widiyanta, M. Hum.
NIP. 19681010 199403 1 001

Reviewer



Ririn Darini, M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001